



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMADI**
2. Jabatan : **DEKAN FAKULTAS PERTANIAN**
3. NHK : **629763**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/996 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , WARISAN Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 498 m2/350 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **200.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO DD1 12 EAT CKD MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **28.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **756.950.428**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **2.385.450.428**

III. HUTANG Rp. **---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.385.450.428**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.